



# **SINERGITAS PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PROGRAM STRATEGIS NASIONAL**

Sidiq Budi Sejati\*

## **Abstrak**

*Dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, pemerintahan Prabowo-Gibran bergerak cepat mewujudkan Asta Cita melalui program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih. Dalam proses pelaksanaannya, masih ditemui beberapa tantangan. Tantangan ini berpotensi menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program-program strategis tersebut pada masa mendatang. Tulisan ini membahas tentang sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program strategis nasional. Ditemukan bahwa penyempurnaan pelaksanaan program terus dilakukan secara bertahap oleh pemerintah melalui penambahan anggaran, namun pemerintah pusat juga perlu memastikan kembali kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung program ini. Komisi II DPR RI dapat terus berkoordinasi dengan pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong pemerintah daerah mendukung segala kebutuhan terkait pelaksanaan program strategis nasional. Melalui fungsi pengawasan, Komisi II DPR juga perlu memastikan agar pemerintah daerah dapat optimal menjalankan program-program tersebut serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat di daerahnya.*

## **Pendahuluan**

Semangat bagi kemajuan masa depan Indonesia sering digaungkan melalui ungkapan “Indonesia Emas 2045”, karena pada tahun 2045 Indonesia telah mencapai usia seratus tahun kemerdekaan. Hal ini mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran bergerak cepat dalam menjalankan Asta Cita demi mewujudkan “Indonesia Emas 2045”. Program Asta Cita mencakup tiga klaster besar di antaranya program hasil cepat (*quick wins*), 17 program prioritas, serta program kartu kesejahteraan sosial dan kredit usaha (Bong, 2025). Sedangkan sejak pelantikan presiden pada Oktober 2024, beberapa program pemerintah yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di antaranya ialah kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih (Arief, 2025).

Program strategis MBG merupakan salah satu program unggulan yang telah dikenal masyarakat sejak masa kampanye pemilihan presiden pada tahun 2024 dan langsung dilaksanakan setelah pelantikan presiden terpilih. Program MBG ini merupakan salah satu program usaha pemerintah dalam meningkatkan status gizi anak-anak Indonesia dan akan dilaksanakan secara bertahap.

\*) Analis Legislatif Ahli Muda Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: [sidiq.sejati@dpr.go.id](mailto:sidiq.sejati@dpr.go.id)

Meskipun demikian, program-program nasional yang dilakukan secara serentak tersebut tentu membutuhkan koordinasi dan sinergitas yang baik dari pusat hingga ke daerah. Hal-hal yang menjadi tantangan juga perlu menjadi perhatian sebagai upaya perbaikan program tersebut ke depannya. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini membahas sinergitas pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program strategis nasional.

## **Pelaksanaan Program Strategis Nasional**

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, program MBG adalah salah satu program yang telah dilaksanakan dan mendapat respons positif dari masyarakat. Meskipun demikian, ditemukan beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Tantangan tersebut di antaranya *pertama*, adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah (pemda). Kondisi ini kemudian menyebabkan pemda tidak dapat memenuhi kecukupan gizi seimbang dari makanan yang disediakan. Keterbatasan anggaran juga menimbulkan masalah baru yakni munculnya pungutan liar dari pihak sekolah dengan dalih membeli wadah makanan. *Kedua*, terkait logistik yang dimulai dari pengadaan bahan makanan, penyimpanan hingga distribusi ke sekolah-sekolah. Distribusi logistik tersebut masih belum dilakukan secara efisien. *Ketiga*, kualitas makanan yang disediakan tidak hanya harus cukup secara jumlah namun juga harus memiliki standar gizi yang baik dan tidak monoton (Varellia, 2025).

Program berikutnya adalah Sekolah Rakyat yang dijalankan oleh Kementerian Sosial. Tantangan yang ditemukan dalam pelaksanaannya seperti kurangnya ketersediaan guru yang mengajar dikarenakan banyak guru yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan, salah satunya ialah masalah lokasi penempatan tugas yang jauh (Fadilah, 2025). Selain itu, faktor penyediaan lahan oleh pemda juga masih menjadi hambatan dalam menjalankan program Sekolah Rakyat ini, dikarenakan lahan yang perlu disediakan oleh pemda minimal seluas lima hektar (Kurniawan, 2025).

Demikian pula dengan pelaksanaan program Koperasi Merah Putih. Program ini merupakan program yang dibentuk di tingkat desa dan kelurahan, beranggotakan masyarakat lokal. Program ini mengusung prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif sebagai dasar pengelolaan ekonomi kolektif (Zahiratul, 2025). Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi masih minim. Dikhawatirkan kondisi ini akan berdampak langsung pada tata kelola koperasi. Tantangan berikutnya dari program ini adalah terjadinya *moral hazard* atau gagal bayar dari nasabah. Hal ini dapat terjadi karena sudut pandang masyarakat mengenai definisi koperasi merupakan program “bantuan” dari pemerintah. Selain itu, dalam level masyarakat dapat terjadi benturan peran dan fungsi lembaga lain di level desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sebelumnya sudah menjalankan koperasi desa (Madjid, 2025).

## **Sinergitas Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Program Strategis Nasional**

Berdasarkan berbagai tantangan tersebut di atas, penyelenggaraan program strategis nasional ini perlu menjadi perhatian serius baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada program MBG, dalam pembacaan RAPBN 2026 dan Nota Keuangan, Presiden Prabowo menyatakan bahwa anggaran dalam program MBG di tahun 2026 akan mencapai Rp335 triliun. Anggaran tersebut naik sekitar 96% dari tahun 2025 yang sebesar Rp171 triliun, Hal ini dilakukan agar program MBG dapat menjangkau siswa, ibu hamil, dan balita dengan jumlah penerima 82,9 juta jiwa. Selain itu, anggaran ini juga akan dimanfaatkan untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) (Rachman, 2025). Dukungan langsung dari pemerintah pusat ini tentu menjadi angin segar bagi keterbatasan anggaran yang dikeluhkan oleh pemda dalam menjalankan program MBG saat ini.

Namun demikian, pemenuhan anggaran oleh pemerintah pusat perlu didukung oleh persiapan yang matang dari pemda setempat. Dukungan tersebut terutama dalam hal koordinasi pembentukan sarana dan prasarana SPPG di wilayahnya masing-masing. Hal lain yang tidak kalah penting adalah dukungan data dari dinas terkait seperti dinas pendidikan, dinas sosial, serta dinas kependudukan dan catatan sipil mulai dari data siswa, ibu hamil dan balita yang selalu terbaru. Kesalahan pemda dalam pendataan akan mengakibatkan selisih dalam pemenuhan kebutuhan MBG di lapangan. Pemda juga perlu untuk memastikan segala kebutuhan SPPG di daerahnya agar satuan tersebut dapat bekerja dengan optimal. Pengawasan oleh pemda dapat dimulai dari memastikan ketersediaan bahan pangan di lokal sampai dengan distribusi makanan di lokasi yang menjadi tujuan MBG. Rantai pasok program MBG ini jika dimanfaatkan oleh pemda dengan baik dapat menggerakkan perekonomian lokal di daerahnya, mulai dari petani sampai dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang otomatis menggerakkan banyak SDM di wilayahnya masing-masing.

Demikian pula dengan program Sekolah Rakyat. Tantangan kurangnya tenaga pendidik dapat diantisipasi dengan pemetaan yang baik terkait kebutuhan guru dan ketersediaan murid oleh pemda di wilayahnya masing-masing. Meskipun pengadaan guru dilakukan oleh pemerintah pusat akan tetapi ketepatan kebutuhan tenaga pendidik di daerah tergantung dari kecermatan pemda dalam menganalisis kebutuhan beban tenaga pendidik di daerahnya. Oleh sebab itu, respons cepat pemda dalam pemenuhan sarana dan prasarana persyaratan pendirian sekolah rakyat seperti lahan untuk bangunan dan data murid yang bersekolah di Sekolah Rakyat sangatlah penting. Dalam hal ini pemda perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai program Sekolah Rakyat kepada masyarakat agar semakin banyak siswa yang masuk dalam Sekolah Rakyat, sekaligus memperhitungkan rasio kebutuhan tenaga pendidik di Sekolah Rakyat. Pemda dapat menjadikan momentum program Sekolah Rakyat ini sebagai bagian dari upaya pemda dalam memperbaiki kualitas SDM masyarakat di wilayahnya. Terutama bagi pemda yang mayoritas masyarakatnya masuk dalam kategori kurang mampu, program Sekolah Rakyat perlu untuk semakin ditingkatkan dan terus dievaluasi secara signifikan agar

semakin banyak siswa yang masuk dalam Sekolah Rakyat, sekaligus memperhitungkan rasio kebutuhan tenaga pendidik di Sekolah Rakyat. Pemda dapat menjadikan momentum program Sekolah Rakyat ini sebagai bagian dari upaya pemda dalam memperbaiki kualitas SDM masyarakat di wilayahnya. Terutama bagi pemda yang mayoritas masyarakatnya masuk dalam kategori kurang mampu, program Sekolah Rakyat perlu untuk semakin ditingkatkan dan terus dievaluasi secara signifikan agar kebutuhan tenaga pendidik, kualitas tenaga pendidik, dan kurikulum sesuai dengan kebutuhan murid setempat maupun dengan kurikulum nasional.

Pada program Koperasi Merah Putih sinergitas pusat dan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara. *Pertama*, dengan meningkatkan kualitas SDM pengurus koperasi yang dianggap masih belum memenuhi kompetensi. Pemda dapat melakukan antisipasi dengan cara menjaring dan memberi pelatihan pada warga, terkait tata kelola perkoperasian yang baik. *Kedua*, pemda perlu semakin meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, terutama pada masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Sosialisasi ditujukan untuk memperkenalkan fungsi dan peran Koperasi Merah Putih beserta peraturan dan regulasi hukum koperasi agar terhindar dari potensi *moral hazard* nasabah di kemudian hari. *Ketiga*, Pemda juga perlu melakukan pengawasan koperasi melalui audit berkala. Hal ini penting untuk mencegah penyelewengan yang dapat saja dilakukan oleh pengurus koperasi. *Keempat*, perlunya harmonisasi regulasi oleh pemda untuk memperjelas peran antara BUMDes, koperasi yang sudah eksis, dan Koperasi Merah Putih. Harmonisasi ini guna mencegah benturan tumpang tindih antara fungsi dan bisnis proses yang sudah berjalan sebelumnya. *Kelima*, pemda setempat juga perlu melakukan komunikasi intensif antar pemerintah desa atau kelurahan di wilayahnya untuk membicarakan potensi kesepakatan kerja sama atau unit bisnis yang paling mungkin dijalankan oleh koperasi setempat. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah timbulnya gesekan perebutan wilayah atau cakupan area kerja koperasi, sehingga ekonomi warga setempat dapat terus berjalan beriringan secara bersama, baik, dan rukun.

## Penutup

Gerak cepat pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mewujudkan Asta Cita dijalankan melalui program seperti MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih yang terus bergulir sampai saat ini. Oleh sebab itu, penyempurnaan pelaksanaan program strategis nasional tersebut perlu dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah secara bertahap. Selain melalui penambahan anggaran, pemerintah pusat juga perlu mengevaluasi kesiapan pemda terkait kualitas koordinasi dan pengawasan terhadap perangkat-perangkatnya dalam mendukung pelaksanaan program strategis nasional di daerahnya.

Melalui fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI dapat terus berkoordinasi dengan pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong pemda mendukung segala kebutuhan terkait pelaksanaan program strategis nasional. Hal penting yang harus menjadi perhatian ialah kesiapan sarana dan prasarana dengan memastikan ketersediaan lahan, kemudahan perizinan, sosialisasi kepada masyarakat daerah terkait tujuan dari

program strategis ini, hingga mempersiapkan kapasitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan. Pemerintah pusat juga perlu terus bersinergi dengan pemda agar ketersediaan data yang selalu terbaru dapat dijamin oleh pemda setiap daerah.

## Referensi

- Arief, Y.N. (2025, Juli 27). MBG hingga koperasi merah putih: sekedar program populis atau putus rantai kemiskinan nasional?. *Kompas.tv.com*. <https://www.kompas.tv/kolom/607781/mbg-hingga-koperasi-merah-putih-sekedar-program-populis-atau-putus-rantai-kemiskinan-nasional>
- Bong, K. (2025, Agustus 19). Mengingat kembali target Prabowo-Gibran dalam visi Asta Cita di sini. *Detiknews.com*. <https://news.detik.com/berita/d-8069185/mengingat-kembali-target-prabowo-gibran-dalam-visi-asta-cita-di-sini>
- Fadilah, R. (2025, Juni 26). Apa itu sekolah rakyat? Program presiden untuk memutus rantai kemiskinan. *Antaranews.com*. <https://www.antaranews.com/berita/4925889/apa-itu-sekolah-rakyat-program-presiden-untuk-memutus-kemiskinan>
- Kurniawan, D. (2025, April 2025). Terkendala lahan, program sekolah rakyat di Gunung Kidul belum bisa direalisasikan. *Harianjogja.com*. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/04/06/513/1209313/terkendala-lahan-program-sekolah-rakyat-di-gunungkidul-belum-bisa-direalisasikan>
- Madjid, Z. (2025, Juli 30). INDEF bagikan 5 tantangan operasional Kopdes Merah Putih. *Cnbcindonesia.com*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250730060129-4-653386/indef-bagikan-5-tantangan-operasional-kopdes-merah-putih#:~:text=%22Dengan%20minimnya%20SDM%2C%20kualitas%20pengelolaan%20koperasi%20juga,pun%20memerlukan%20latar%20belakang%20pendidikan%20tertentu%2C%22%20ujarnya.>
- Rachman, A. (2025, Agustus 15). Prabowo naikan anggaran MBG nyaris 100% jadi Rp335 triliun pada 2026. *Cnbcindonesia.com*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250815153918-4-658452/prabowo-naikkan-anggaran-mbg-nyaris-100-jadi-rp-335-triliun-pada-2026>
- Varella, A.L.A.R. (2025, Januari 14). Tantangan dalam penerapan program makan siang gratis: dari anggaran, logistik hingga kualitas makanan. *Kompasiana.com*. [https://www.kompasiana.com/varella04/67854b21c925c477284eed44/tantangan-dalam-penerapan-program-makan-siang-gratis-dari-anggaran-logistik-hingga-kualitas-makanan?page=1&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/varella04/67854b21c925c477284eed44/tantangan-dalam-penerapan-program-makan-siang-gratis-dari-anggaran-logistik-hingga-kualitas-makanan?page=1&page_images=1)
- Zahiratul, Z.F. (2025, Juli 8). Koperasi Merah Putih: Pengertian, manfaat, dan cara daftarnya. *Metrotvnews.com*. <https://www.metrotvnews.com/play/NxGCG0zg-koperasi-merah-putih-pengertian-manfaat-dan-cara-daftarnya>